



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA EKONOMI BILATERAL  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwan Sinaga

Jabatan : Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Edi Prio Pambudi

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

Pihak Kedua,


Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama  
Ekonomi dan Investasi

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi  
Bilateral



Edi Prio Pambudi



Irwan Sinaga

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA EKONOMI BILATERAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi	1.1 Tingkat Efektifitas Kerja Sama Ekonomi Bilateral melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan, dan Nilai Investasi dengan negara Mitra Indonesia	85%
		1.2 Persentase Penyelesaian Isu Strategis pada Kesepakatan Perjanjian Indonesia- European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU CEPA)	100%
		1.3 Persentase Penyelesaian Isu Strategis pada Kesepakatan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat	100%
2.	Terwujudnya Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Berkualitas	2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan Negara Mitra Indonesia	85%
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang berkualitas	3.1 Indeks Kepuasan Layanan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral	3 dari 4
4.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Profesional	4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral	92%

Program : Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

**Kegiatan**

1. Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral	Rp	2.335.907.000
<b>Total</b> (Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Rupiah)	<b>Rp</b>	<b>2.335.907.000</b>

Pihak Kedua,

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

**Edi Prio Pambudi**

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral

  
**Iwan Sinaga**

**Sasaran Kegiatan**

1. Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi

**Deskripsi Sasaran Kegiatan**

Kerja sama ekonomi bilateral merupakan instrumen strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara mitra guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Sasaran kegiatan ini menekankan pentingnya kesepakatan dan implementasi kerja sama bilateral yang efektif, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia.

Ruang lingkup kerja sama bilateral yang dimaksud mencakup perjanjian kerja sama ekonomi termasuk di sektor perdagangan dan investasi dibawah pengendalian Kemenko Perekonomian, kesepakatan dalam forum kerja sama ekonomi bilateral yang dikoordinasi dan ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian, serta kesepakatan implementasi kerja sama ekonomi lainnya termasuk proyek strategis yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian/lembaga terkait.

Sasaran kegiatan ini menunjukkan hasil dari Asisten Deputi Kerja Sama Bilateral dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan dalam bidang kerja sama bilateral. Tujuannya adalah untuk mengakselerasi manfaat nyata dari kerja sama internasional dalam meningkatkan daya saing, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan

**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

IKU 1.1 Tingkat Efektifitas Kerja Sama Ekonomi Bilateral melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi dengan Negara Mitra Indonesia.

**Deskripsi IKU**

**Definisi**

IKU ini mengukur tingkat efektivitas kerja sama ekonomi bilateral yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator ini mencerminkan keberhasilan dalam mengoordinasikan, mensinkronisasikan, mengendalikan kebijakan serta menindaklanjuti kerja sama ekonomi bilateral dengan negara mitra utama yang menghasilkan komitmen konkret, serta mendorong peningkatan volume perdagangan dan investasi.

**Formula**

Efektivitas kerja sama ekonomi bilateral ini dihitung dan diukur berdasarkan tiga komponen utama dengan pembobotan sebagai berikut:

**1. Jumlah Penyelesaian Komitmen Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan Negara Mitra Indonesia (80%)**

Komponen ini mengukur jumlah kesepakatan tertulis atau komitmen resmi yang disepakati antara Indonesia dan negara mitra, yang mencerminkan bentuk kerja sama ekonomi bilateral. Cakupan kesepakatan tersebut dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, komitmen di bidang perdagangan, investasi, serta

kerja sama ekonomi lainnya yang relevan dengan kepentingan nasional. Komitmen tersebut diperoleh melalui kesepakatan dalam berbagai forum kerja sama ekonomi bilateral, diplomasi ekonomi, *business matching*, maupun proyek serta bentuk kerja sama lainnya yang difasilitasi dan/atau dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian bersama K/L terkait.

Komponen ini dibobotkan sebesar 80% karena pelaksanaan proses kerja sama ekonomi bilateral merupakan tugas dan fungsi pokok dari Asdep KSE Bilateral.

Target Jumlah Komitmen Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan Negara Mitra Indonesia Tahun 2026 sebesar **20 Komitmen**, yaitu:

**a) 8 Komitmen kerja sama ekonomi yang terselesaikan**

1. Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-Inggris;
2. Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-Korea Selatan;
3. Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-RRT;
4. Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-Australia;
5. Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-Amerika Serikat;
6. Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-EAEU;
7. Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-Kanada;
8. Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-Jepang;

**b) 10 Komitmen pada forum yang terlaksana**

1. Komitmen pada forum WGTII RI-Rusia;
2. Komitmen pada forum SKB RI-Rusia;
3. Komitmen pada forum Board Meeting Prospera Phase II;
4. Komitmen pada forum the 13th SOM 6 WG RI-Singapura;
5. Komitmen pada forum the 16th MM 6 WG RI-Singapura;
6. Komitmen pada forum SKB RI-Belarus;
7. Komitmen pada forum the 4th PPDT 1.5 RI-Jepang;
8. Komitmen pada forum the 4th SOM JCEC RI-Korea Selatan;
9. Komitmen pada forum the 3rd MM JCEC RI-Korea Selatan;
10. Komitmen pada forum SEOM RI-Australia;

**c) 2 Komitmen implementasi yang terlaksana**

1. Komitmen implementasi dari kesepakatan RI-IPEF;
2. Komitmen implementasi dari kesepakatan RI-Korea (IKCEPA).

**2. Penguatan Realisasi Nilai Perdagangan dengan Negara Mitra Indonesia (10%)**

Komponen ini mengukur nilai ekspor (dalam mata uang USD) dengan negara mitra Indonesia yang memiliki hubungan kerja sama ekonomi bilateral dengan Kemenko Perekonomian. Negara Mitra Indonesia yang dimaksud antara lain: Singapura, Korea Selatan, Amerika Serikat, RRT, Kanada, Jepang, Australia, Inggris, Uni Eropa, Uni Ekonomi Eurasia, Rusia, Belarus.

Realisasi dari nilai perdagangan bersifat tahunan. Nilai yang diperoleh di suatu tahun dapat terealisasi secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Realisasi sub komponen ini adalah perolehan nilai perdagangan dari Januari - Oktober tahun berjalan.

Komponen ini dibobotkan sebesar 10% karena sub komponen dimaksud bukan hanya dikontribusikan oleh Kemenko Perekonomian namun merupakan upaya kolektif berbagai pihak, termasuk Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, asosiasi, dan dunia usaha.

Target Nilai Perdagangan dengan Negara Mitra Indonesia Tahun 2026 yang memiliki kerja sama ekonomi bilateral dengan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral, Kemenko Perekonomian sebesar **USD 161 Miliar**. Perhitungan target berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekspor di tahun 2026 dari nilai rata-rata perdagangan 5 tahun terakhir (2021-2025). Data diolah bersumber dari Kementerian Perdagangan.

### 3. Penguatan Realisasi Nilai Investasi dengan Negara Mitra Indonesia (10%)

Komponen ini mengukur nilai investasi yang terealisasi (dalam mata uang USD) dengan negara mitra Indonesia yang memiliki hubungan kerja sama ekonomi bilateral dengan Kemenko Perekonomian. Negara Mitra Indonesia yang dimaksud antara lain: Singapura, Korea Selatan, Amerika Serikat, RRT, Kanada, Jepang, Australia, Inggris, Uni Eropa, Uni Ekonomi Eurasia, Rusia, Belarus.

Realisasi nilai investasi bersifat tahunan. Nilai yang diperoleh di suatu tahun dapat terealisasi secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Realisasi dari nilai investasi ini diperoleh dari nilai investasi dari Januari - September tahun berjalan.

Komponen ini dibobotkan sebesar 10% karena sub komponen dimaksud bukan hanya dikontribusikan oleh Kemenko Perekonomian namun merupakan upaya kolektif berbagai pihak, termasuk Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, asosiasi, dan dunia usaha.

Target Nilai Investasi dengan Negara Mitra Indonesia tahun 2026 yang memiliki kerja sama ekonomi bilateral dengan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral, Kemenko Perekonomian sebesar **USD 35 Miliar**. Perhitungan target berdasarkan total nilai rata-rata investasi dengan negara mitra utama Indonesia 5 tahun terakhir dengan data diolah berdasarkan data dari website BKPM/Kementerian Investasi

Sehingga realisasi IKU 1.1 diperoleh dari penjumlahan bobot atas capaian 3 komponen di atas.

#### Berikut formula perhitungannya

$$\% \text{ Tingkat Efektifitas Kerja Sama} = (\% \text{Capaian SubKomp 1} \times 80\%) + (\% \text{Capaian SubKomp 2} \times 10\%) + (\% \text{Capaian SubKomp 3} \times 10\%)$$

#### Tujuan

IKU ini bertujuan untuk mengukur seberapa efektif koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan kerja sama ekonomi bilateral yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mendorong hasil nyata berupa peningkatan jumlah komitmen kerja sama, nilai perdagangan, dan nilai investasi dengan negara mitra utama Indonesia.

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Asdep Kerja Sama Ekonomi Bilateral

<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Asdep Kerja Sama Ekonomi Bilateral
<b>Sumber Data</b>	Asdep Kerja Sama Ekonomi Bilateral
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(....) High                      ( X ) Moderate                      ( ... ) Low
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	( X ) Exact                      (...) Proxy                      (....) Activity
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	( ... ) Sum                      (....) Average                      ( X ) Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>	( X ) Cascading Peta                      ( ... ) Cascading Non Peta                      (....) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	(...) Direct                      ( X ) Indirect
<b>Polarisasi IKU</b>	(X) Maximize                      (.....) Minimize                      (.....) Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	(....) Bulanan                      (X) Triwulanan                      (....) Semesteran                      ( ... ) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
<b>TAHUNAN</b>	N/A	N/A	85%	107%	85%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	60%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	85%

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral  
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

**Sasaran Kegiatan**

1. Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi

**Deskripsi Sasaran Kegiatan**

Kerja sama ekonomi bilateral merupakan instrumen strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara mitra guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Sasaran kegiatan ini menekankan pentingnya kesepakatan dan implementasi kerja sama bilateral yang efektif, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia.

Ruang lingkup kerja sama bilateral yang dimaksud mencakup perjanjian kerja sama ekonomi termasuk di sektor perdagangan dan investasi dibawah pengendalian Kemenko Perekonomian, kesepakatan dalam forum kerja sama ekonomi bilateral yang dikoordinasi dan ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian, serta kesepakatan implementasi kerja sama ekonomi lainnya termasuk proyek strategis yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian/lembaga terkait.

Sasaran kegiatan ini menunjukkan hasil dari Asisten Deputi Kerja Sama Bilateral dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan dalam bidang kerja sama bilateral. Tujuannya adalah untuk mengakselerasi manfaat nyata dari kerja sama internasional dalam meningkatkan daya saing, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan

**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

IKU 1.2 Persentase Penyelesaian Isu Strategis pada Kesepakatan Perjanjian Indonesia - European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU CEPA)

**Deskripsi IKU**

**Definisi**

Penyelesaian isu strategis pada kesepakatan pada perjanjian Indonesia - European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU CEPA) yang merupakan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa untuk memperkuat hubungan dagang dan investasi, yang bertujuan menghapus tarif impor secara luas untuk produk Indonesia ke Eropa dan membuka pasar Eropa, serta membuka akses investasi bagi Eropa ke Indonesia. Perjanjian ini ditangani oleh beberapa Kementerian dengan koordinasi utamanya berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Perjanjian ini penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

Indikator ini mencerminkan keberhasilan dalam mengoordinasikan, mensinkronisasikan, mengendalikan kebijakan serta menindaklanjuti kerja sama ekonomi bilateral dengan European Union (EU) sebagai mitra utama Indonesia yang menghasilkan komitmen konkret, serta mendorong peningkatan volume perdagangan dan investasi.

**Formula**

Target IKU ini adalah 100% dari upaya-upaya penyelesaian isu strategis pada kesepakatan perjanjian Indonesia- EU CEPA yang dapat direalisasikan oleh kedua belah pihak berdasarkan 5 (lima)

kegiatan dalam upaya penyelesaian isu strategis pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan identifikasi isu-isu strategis dalam Legal Scrubbing IEU-CEPA
2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi antar K/L pembahasan penyelesaian isu strategis dalam proses Legal Scrubbing Perjanjian Indonesia - EU CEPA
3. Penyelenggaraan Bilateral Meeting dengan Uni Eropa
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi antar K/L pembahasan persiapan finalisasi Penandatanganan Perjanjian Indonesia - EU CEPA
5. Penyelenggaraan dukungan substansi dan logistik pada Hari Penandatanganan Perjanjian Indonesia - EU CEPA

Berikut formula perhitungannya

$$\% \text{ Penyelesaian Isu Strategis} = \left( \frac{\text{Target Penyelesaian Isu Strategis}}{\text{Realisasi Penyelesaian Isu Strategis}} \right) \times 100\%$$

**Tujuan**

IKU ini bertujuan untuk mengukur seberapa efektif koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan kerja sama ekonomi bilateral yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mendorong hasil nyata berupa penyelesaian isu strategis pada kesepakatan pada perjanjian Indonesia- European Union CEPA

Satuan Pengukuran	Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data	Asdep Kerja Sama Ekonomi Bilateral
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asdep Kerja Sama Ekonomi Bilateral
Sumber Data	Asdep Kerja Sama Ekonomi Bilateral
Tingkat Kendali IKU	(....) High                      (X) Moderate                      (... ) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact                      (...) Proxy                      (....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum                      (....) Average                      ( X ) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta                      (... ) Cascading Non Peta                      (....) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct                      (X) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize                      (.....) Minimize                      (.....) Stabilize
Periode Pelaporan	(....) Bulanan                      (X) Triwulanan                      (...) Semesteran                      (... ) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	80%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral  
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

**Sasaran Kegiatan**

1. Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi

**Deskripsi Sasaran Kegiatan**

Kerja sama ekonomi bilateral merupakan instrumen strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara mitra guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Sasaran kegiatan ini menekankan pentingnya kesepakatan dan implementasi kerja sama bilateral yang efektif, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia.

Ruang lingkup kerja sama bilateral yang dimaksud mencakup perjanjian kerja sama ekonomi termasuk di sektor perdagangan dan investasi dibawah pengendalian Kemenko Perekonomian, kesepakatan dalam forum kerja sama ekonomi bilateral yang dikoordinasi dan ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian, serta kesepakatan implementasi kerja sama ekonomi lainnya termasuk proyek strategis yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian/lembaga terkait.

Sasaran kegiatan ini menunjukkan hasil dari Asisten Deputi Kerja Sama Bilateral dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan dalam bidang kerja sama bilateral. Tujuannya adalah untuk mengakselerasi manfaat nyata dari kerja sama internasional dalam meningkatkan daya saing, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan

**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

IKU 1.3 Persentase Penyelesaian Isu Strategis pada Kesepakatan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat

**Deskripsi IKU**

**Definisi**

Penyelesaian isu strategis pada kesepakatan pada perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia – Amerika Serikat merupakan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Amerika Serikat untuk memperkuat hubungan dagang dan investasi, yang bertujuan menghapus tarif impor secara luas untuk produk Indonesia ke Amerika Serikat dan membuka pasar Amerika Serikat, serta membuka akses investasi bagi Amerika Serikat ke Indonesia. Perjanjian ini ditangani oleh beberapa Kementerian dengan koordinasi utamanya berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Perjanjian ini penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

Indikator ini mencerminkan keberhasilan dalam mengoordinasikan, mensinkronisasikan, mengendalikan kebijakan serta menindaklanjuti kerja sama ekonomi bilateral dengan Amerika Serikat sebagai mitra utama Indonesia yang menghasilkan komitmen konkret, serta mendorong peningkatan volume perdagangan dan investasi.

**Formula**

Target IKU ini 100% dari upaya-upaya penyelesaian isu strategis pada kesepakatan perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia-Amerika Serikat yang dapat direalisasikan oleh belah pihak berdasarkan 8 (delapan) target penyelesaian isu strategis pada tahun 2026 sebagai berikut:

1. Penyelesaian isu strategis pada *intersessional meeting* perjanjian perdagangan resiprokal (ART dan CSC) secara virtual;
2. Penyelesaian isu strategis pada perundingan ke-6 perjanjian perdagangan resiprokal in person di Washington DC;
3. Penyelesaian isu strategis dan sensitif pada *Ministerial Meeting*;
4. Penyelesaian isu strategis pada pelaksanaan Indonesia-United States Leaders and Business Summit 2026;
5. Penyelesaian isu strategis dalam dokumen perjanjian perdagangan resiprokal (ART dan CSC) Indonesia-Amerika Serikat;
6. Penyelesaian isu strategis pada *Consultation of Section 301 Investigation of the Trade Act of 1974*;
7. Penyelesaian isu strategis pada penyusunan amandemen perjanjian perdagangan resiprokal (ART) Indonesia-AS;
8. Penyelesaian isu strategis tindak lanjut amandemen perjanjian perdagangan resiprokal (ART) Indonesia-AS.

Berikut formula perhitungannya

$$\% \text{ Penyelesaian Isu Strategis} = \left( \frac{\text{Target Penyelesaian Isu Strategis}}{\text{Realisasi Penyelesaian Isu Strategis}} \right) \times 100\%$$

#### Tujuan

IKU ini bertujuan untuk mengukur seberapa efektif koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan kerja sama ekonomi bilateral yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mendorong hasil nyata berupa penyelesaian isu strategis pada kesepakatan pada perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia-Amerika Serikat

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Asdep Kerja Sama Ekonomi Bilateral

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asdep Kerja Sama Ekonomi Bilateral

Sumber Data

Asdep Kerja Sama Ekonomi Bilateral

Tingkat Kendali IKU

(.....) High (X) Moderate ( ... ) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (..) Proxy (.....) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(...) Sum (.....) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta ( ... ) Cascading Non Peta (.....) Non-Cascading

Metode Cascading

(...) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize

Periode Pelaporan

(....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran ( ... ) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	62.5%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	75%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	87.5%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral  
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

<b>Sasaran Kegiatan</b>	Terwujudnya Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Berkualitas
<b>Deskripsi Sasaran Kegiatan</b>	<p>Kebijakan yang berkualitas ditandai oleh kejelasan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta keterkaitannya dengan visi, rencana pembangunan, dan mandat kelembagaan. Kebijakan yang berkualitas disusun melalui proses yang inklusif dan terkoordinasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait serta mempertimbangkan keterpaduan lintas sektor untuk memastikan kebijakan tidak tumpang tindih, selaras dengan kebijakan lain, dan memperoleh dukungan dalam implementasinya. Terkait dengan itu mengamankan Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Bilateral dalam menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang menjalankan fungsinya sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden, berupa sinkronisasi dan koordinasi dalam perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral;</li> <li>b) Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral;</li> <li>c) Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral;</li> <li>d) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral; dan</li> <li>e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi kerja Sama Ekonomi dan Investasi.</li> </ol>
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	IKU 2.1 Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum, dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan Negara Mitra Indonesia.
<b>Deskripsi IKU</b>	<p><b>Definisi</b></p> <p>Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) tahapan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Perencanaan Kebijakan;</li> <li>II. Implementasi Kebijakan;</li> <li>III. Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan;</li> <li>IV. Transparansi dan Partisipasi Publik.</li> </ol> <p>Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).</p> <p>Kegiatan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian (SKP) kebijakan terkait kerja sama ekonomi bilateral yang berdasarkan pada kegiatan-kegiatan yang</p>

menjadi lingkup kerja Keasdepan KSE Bilateral, yaitu seperti: SKP dalam rangka penyelesaian kesepakatan dalam perundingan perjanjian perdagangan dan investasi, PTA/FTA/CEPA, maupun kesepakatan kerjasama ekonomi bilateral. Selain itu SKP dalam rangka penyelesaian kesepakatan yang terdapat dalam forum kerja sama ekonomi bilateral yang dikoordinasikan dan ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian. Serta SKP dalam rangka untuk implementasi kerja sama ekonomi bilateral di bawah pengendalian Kemenko Perekonomian.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian 4 (empat) tahapan siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

#### **Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan**

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan. Keluaran (*output*) yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada Tahapan Perencanaan ini adalah Undangan dan Bahan/Materi Rapat Koordinasi dimana tujuan dari rakor ini adalah dalam rangka mengidentifikasi isu dan mengumpulkan informasi serta perkembangan terbaru terkait kerja sama ekonomi bilateral. Contohnya Bahan Rapat Koordinasi Pembahasan Isu-isu dalam WGTII RI-Rusia.

Apabila kebijakan yang disusun telah melalui proses tahapan pertama ini maka unit kerja menerima persentase realisasi kinerja **Tahapan I- Perencanaan 20%**.

#### **Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan**

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;

- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah telaah staf / kertas posisi Pemri/ Brief Notes/ Nota Dinas Laporan atas suatu pembahasan isu dalam mencapai kesepakatan kerja sama ekonomi bilateral. Contohnya Laporan Perkembangan Isu-isu dalam Pertemuan WGTII RI-Rusia.

Apabila kebijakan yang disusun telah melalui proses tahapan kedua ini maka unit kerja menerima persentase realisasi kinerja **Tahapan II-Implementasi Kebijakan 25%**.

#### **Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan**

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Kertas Posisi Pemri/ Talking Points/ Agreed Minutes/Protokol/Joint Report. Contohnya Protokol Pertemuan WGTII RI-Rusia atau Agreed Minutes Pertemuan SKB RI-Rusia.

Apabila kebijakan yang disusun telah melalui proses tahapan ketiga ini maka unit kerja menerima persentase realisasi kinerja **Tahapan III-Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan 27,5%**.

#### **Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik**

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga

evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Memo Kebijakan;
- Rancangan Kebijakan;
- Hasil Konsultasi.
- Sosialisasi/Diseminasi
- Siaran Berita di Media Massa

Dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan / Brief Notes Hasil diseminasi atau sosialisasi, maupun siaran berita di media massa terkait hasil kerja sama ekonomi bilateral untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik. Contoh press conference terkait hasil negosiasi perdagangan resiprokal RI-AS. Apabila kebijakan yang disusun telah melalui proses tahapan keempat ini maka unit kerja menerima persentase realisasi kinerja **Tahapan IV-Transparansi dan Partisipasi Publik 27,5%**.

#### **Formula**

Target Dokumen pada setiap tahapannya adalah sejumlah 22 (dua puluh dua) terkait penyelesaian komitmen kerja sama dan isu strategis perjanjian, sebagai berikut:

1. Penyelesaian Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-Inggris;
2. Penyelesaian Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-Korea Selatan;
3. Penyelesaian Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-RRT;
4. Penyelesaian Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-Australia;
5. Penyelesaian Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-Amerika Serikat;
6. Penyelesaian Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-EAEU;
7. Penyelesaian Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-Kanada;
8. Penyelesaian Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-Jepang;
9. Penyelesaian Isu Strategis pada perjanjian I-EU CEPA
10. Penyelesaian Isu Strategis pada perjanjian perdagangan resiprokal I-Amerika Serikat
11. Penyelesaian Komitmen pada forum WGTII RI-Rusia;
12. Penyelesaian Komitmen pada forum SKB RI-Rusia;
13. Penyelesaian Komitmen pada forum Board Meeting Prospera Phase II;
14. Penyelesaian Komitmen pada forum the 13th SOM 6 WG RI-Singapura;
15. Penyelesaian Komitmen pada forum the 16th MM 6 WG RI-Singapura;
16. Penyelesaian Komitmen pada forum the 4th PPDT 1.5 RI-Jepang;
17. Penyelesaian Komitmen pada forum the 4th SOM JCEC RI-Korea Selatan;
18. Penyelesaian Komitmen pada forum the 3rd MM JCEC RI-Korea Selatan;
19. Penyelesaian Komitmen pada forum SKB RI-Belarus;
20. Penyelesaian Komitmen pada forum SEOM RI-Australia;
21. Penyelesaian Komitmen implementasi dari kesepakatan I-K CEPA;
22. Penyelesaian Komitmen implementasi dari kesepakatan RI-IPEF.

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama  

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$
2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua  

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$
3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga  

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$
4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat  

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

Nilai Akhir Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian terkait dengan bidang kerjasama ekonomi bilateral = 100%

% Efektivitas SKP = Nilai Tahapan I + Nilai Tahapan II + Nilai Tahapan III + Nilai Tahapan IV

#### Tujuan

Mengukur Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Bilateral melalui Penyelesaian Komitmen, Penyelesaian Isu Strategis Perjanjian Perdagangan, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan Negara Mitra Indonesia

Satuan Pengukuran

Presentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Asisten Deputi kerja Sama Ekonomi Bilateral

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi kerja Sama Ekonomi Bilateral

Sumber Data

Asisten Deputi kerja Sama Ekonomi Bilateral

Tingkat Kendali IKU

(.....) High                      ( X ) Moderate                      ( ... ) Low

Tingkat Validitas IKU

( X ) Exact                      ( ... ) Proxy                      (.....) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(...) Sum                      (..) Average                      ( X ) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(V) Cascading Peta                      ( ... ) Cascading Non Peta                      (.....) Non-Cascading Peta

Metode Cascading

(...) Direct                      ( X ) Indirect

Polarisasi IKU

( X ) Maximize                      (.....) Minimize                      (.....) Stabilize

Periode Pelaporan

(...) Bulanan                      ( X ) Triwulanan                      (....) Semesteran                      ( ... ) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	75%	100%	85%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	45%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	75%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	85%

## MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA EKONOMI BILATERAL  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

**KODE IKU: 3.1**

**Sasaran Kegiatan** : Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang berkualitas

**Deskripsi Sasaran Kegiatan**

Layanan penyelenggaraan SKP yang berkualitas merupakan layanan yang diselenggarakan secara profesional dan berstandar, dengan orientasi pada kebutuhan pengguna, sehingga mampu memberikan kepastian proses, kemudahan akses, serta hasil layanan yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, layanan yang berkualitas ditandai dengan kemampuan penyelenggara layanan dalam merespons kebutuhan, masukan, dan permasalahan secara cepat, tepat, dan solutif, serta memastikan adanya tindak lanjut yang jelas dan terukur. Pelaksanaan layanan yang berkualitas meliputi:

- a. Efektivitas fasilitasi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan;
- b. Responsivitas terhadap kebutuhan koordinasi lintas sektor;
- c. Akurasi informasi dan berbasis data yang valid;
- d. Transparansi proses dan hasil pelayanan;
- e. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung layanan.

**Indikator Kinerja Utama (IKU)** : IKU.3.1 Indeks Kepuasan Layanan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral

**Deskripsi IKU** :

**Definisi**

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

**Formulasi**

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian}}{\text{Rerata jawaban dari masing-masing item survey}} \times \text{Jumlah Item Survey}$$

Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk masing-masing unit eselon II, dengan empat kategori penilaian:

- A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4
- B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50
- C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00

D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50

**Tujuan**

Mengukur tingkat Kepuasan layanan di proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam upaya penyelesaian komitmen Kerjasama dan penyelesaian isu strategis perjanjian dengan negara mitra oleh Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

**Satuan Pengukuran**

Indeks

**Unit/Pihak Penyedia Data**

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral

**Pejabat Penanggung Jawab Data**

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral

**Sumber Data**

Hasil survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral

**Tingkat Kendali IKU**

(....) High (X) Moderate (....) Low

**Tingkat Validitas IKU**

(X) Exact (....) Proxy (....) Activity

**Jenis Konsolidasi Periode**

(....) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value

**Jenis Cascading IKU**

(X) Cascading Peta (... Cascading Non Peta (....) Non-Cascading

**Metode Cascading**

(....) Direct (X) Indirect

**Polarisasi IKU**

(X) Maximize (....) Minimize (....) Stabilize

**Periode Pelaporan**

(....) Bulanan (X) Triwulanan (...) Semesteran (....) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	3 dari 4	1 dari 4
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	3 dari 4	1 dari 4
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	3 dari 4	2 dari 4
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	3 dari 4	3 dari 4

## MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA EKONOMI BILATERAL  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

**KODE IKU 4.1**

**Sasaran Kegiatan** : Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Profesional

**Deskripsi Sasaran Kegiatan** : Terwujudnya RB Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang profesional merupakan sasaran kegiatan pada Perspektif Pengembangan Internal yang diturunkan dari level ke deputian. Ketercapaian sasaran kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas organisasi, sistem kerja, dan sumber daya pendukung, sehingga mampu mendukung terselenggaranya proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan secara efektif di lingkungan Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Bilateral.

**Indikator Kinerja Utama (IKU)** : IKU.4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral

**Deskripsi IKU** : **Definisi**  
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Bilateral merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi RB di lingkungan Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Bilateral. Adapun komponen penilaian RB di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi RB General dan/ atau RB Tematik di lingkungan Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Bilateral. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau RB Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General di Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral 2026 adalah sebagai berikut:

Inisiatif Strategis	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Optimalisasi Implementasi Reformasi Birokrasi General lingkungan di Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral	1. Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Manual IKU	5. Penyusunan Laporan Kinerja TW 2	0. Penyusunan Laporan Kinerja TW 3	14. Penyusunan Laporan Kinerja TW 4
	2. Penyusunan Laporan Kinerja TW 1	6. Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI TW 2	1. Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI TW 3	15. Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI TW 4
	3. Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI TW 1	7. Penyusunan Revisi Renja 2026	2. Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri SPIP	
	4. Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja	8. Penyusunan RENJA 2027	3. Penyusunan Matriks Manajemen Risiko	
		9. Penyusunan TOR dan RAB		

**Formula**

Persentase pelaksanaan rencana aksi RB di lingkungan Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Bilateral dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan/atau RB Tematik di Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Bilateral

dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun.

Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Bilateral:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

**Tujuan**

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat pelaksanaan RB General di Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral

<b>Satuan Pengukuran</b>	:	Persentase		
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	:	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral		
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	:	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral		
<b>Sumber Data</b>	:	Rekapitulasi/Tabulasi Data pengumpulan bukti dukung dalam rangka penilaian Reformasi Birokrasi tingkat Kementerian		
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> High	<input type="checkbox"/> Moderate	<input type="checkbox"/> Low
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	:	<input type="checkbox"/> Exact	<input checked="" type="checkbox"/> Proxy	<input type="checkbox"/> Activity
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	:	<input type="checkbox"/> Sum	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta	<input type="checkbox"/> Cascading Non Peta	<input type="checkbox"/> Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	:	<input type="checkbox"/> Direct	<input checked="" type="checkbox"/> Indirect	
<b>Polarisasi IKU</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
<b>TAHUNAN</b>	N/A	N/A	85%	107%	85%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	60%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	85%

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA EKONOMI BILATERAL**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja				
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi	1.1 Tingkat Efektifitas Kerja Sama Ekonomi Bilateral melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan, dan Nilai Investasi dengan negara Mitra Indonesia	85%	<p><b>KOMPONEN PERTAMA</b></p> <p>Penyelesaian 20 (Dua Puluh) Komitmen Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan Negara Mitra Indonesia yang terdiri dari:</p> <p>a. 8 Komitmen kerja sama ekonomi yang terselesaikan</p> <p>b. 10 Komitmen pada Forum yang terlaksana</p>	<p>1. Komitmen Kerja Sama Bilateral Indonesia – Inggris (Perandatanganan RI-Inggris Economic Growth Partnership Agreement)</p>	<p>2. Komitmen Kerja Sama Bilateral Indonesia-Korea (Perandatanganan MOU on Economic Cooperation 2.0)</p> <p>3. Komitmen Kerja Sama Bilateral Indonesia-Tiongkok (Joint Press Release pada International Seminar on Upskilling Negotiation for Government Officials of Indonesia)</p> <p>4. Komitmen Kerja Sama Bilateral Indonesia – Australia (Penandatanganan High Level Action Plan Prospera Phase II)</p>	<p>5. Komitmen Kerja Sama Bilateral Indonesia-Amerika Serikat (Joint Statement pada KTT STM (Industry Outreach, bilateral meeting, dan SEAFEC))</p> <p>6. Komitmen Kerja Sama Bilateral Indonesia – EAEU (Ratifikasi Indonesia - EAEU FTA)</p>	<p>7. Komitmen Kerja Sama Bilateral Indonesia-Kanada (Ratifikasi I-CA CEPAA)</p> <p>8. Komitmen Kerja Sama Bilateral Indonesia-Jepang (Ratifikasi Protokol Perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (JEPA))</p>	<p>10. Komitmen Pada Forum SEOM RI - Australia (Agreed Minutes of Indonesia - Australia SEOM)</p>
				<p>1. Komitmen pada Forum WGTII RI – Rusia (Protocol WGTII RI-Rusia)</p> <p>2. Komitmen pada Forum SKB RI – Rusia (Agreed Minutes of JCM RI – Russia)</p> <p>3. Komitmen pada Forum Board Meeting Prospera Phase II (Agreed Minutes of Prospera Board Meeting)</p> <p>4. Komitmen pada Forum the 13th Senior Official Meeting 6 WG Indonesia – Singapura (Agreed Minutes of the 13th Senior Official Meeting 6 WG</p>	<p>7. Komitmen pada Forum the 4th PPDT 1.5 Indonesia-Jepang (Joint Statement Public-Private Dialogue Track (PPDT) 1.5 ke-4 Indonesia-Jepang)</p> <p>8. Komitmen pada Forum the 4th Senior Official Meeting Joint Economic Committee on Cooperation (JCEC) RI – Korea (Agreed Minutes of the 4th Senior Official Meeting JCEC RI – Korea)</p>				



					sektor investasi pada TW 1 2026	sama bilateral sektor investasi pada TW 2 2026	kerja sama bilateral sektor investasi pada TW 3 2026
1.2	100%	Penyelesaian Substansi Perjanjian dan Legal Scrubbing Perjanjian Indonesia – EU CEPA	1. Pelaksanaan Identifikasi isu-isu strategis dalam Legal Scrubbing IEU-CEPA	2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi antar K/L pembahasan penyelesaian isu strategis dalam proses Legal Scrubbing Perjanjian Indonesia - EU CEPA	3. Penyelenggaraan <i>bilateral meeting</i> dengan Uni Eropa	4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi antar K/L pembahasan persiapan finalisasi Penandatanganan Perjanjian Indonesia - EU CEPA	5. Penyelenggaraan dukungan substansi dan logistik pada hari penandatangan perjanjian IEU-CEPA
1.3	100%	Penyelesaian Substansi Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia- Amerika Serikat	1. Penyelesaian isu strategis pada <i>Interresional Meeting</i> Perjanjian Perdagangan Resiprokal (ART dan CSC) secara virtual 2. Penyelesaian isu strategis pada Perundingan putaran ke-6 Perjanjian Perdagangan Resiprokal in person di Washington DS 3. Penyelesaian isu strategis dan sensitif pada <i>Ministerial Meeting</i> 4. Penyelesaian isu strategis pada pelaksanaan Indonesia - United States Leaders and Business Summit 2026 5. Penyelesaian isu strategis dalam dokumen perjanjian perdagangan resiprokal (ART dan CSC) Indonesia dan Amerika Serikat	6. Penyelesaian isu strategis pada <i>Consultation of Section 301 Investigation of the Trade Act of 1974</i>	7. Penyelesaian isu strategis penyusunan amandemen perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia-AS (ART)	8. Penyelesaian isu-isu strategis tindak lanjut amandemen perjanjian perdagangan resiprokal (ART) Indonesia – AS	

2.	Terwujudnya Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Berkualitas	2.1 Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Kelengkapan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan Negara Mitra Indonesia	85%	Perencanaan, Implementasi, Evaluasi, dan Partisipasi publik pada penyelesaian komitmen kesepakatan kerja sama ekonomi bilateral, termasuk penyelesaian isu strategis pada perjanjian H-EU CEPA dan perjanjian perdagangan resiprokal I-AS	1. Melakukan Rakor Persiapan, melaksanakan penandatangan perjanjian, mengevaluasi, serta menyusun konsep siaran pers terkait penyelesaian Isu Strategis pada Kesepakatan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-AS	3. Melakukan Rakor Persiapan, melaksanakan penandatangan perjanjian, mengevaluasi, serta menyusun konsep siaran pers terkait penyelesaian komitmen kerja sama bilateral Indonesia-Korea pada MOU on Economic Cooperation 2.0	6. Melakukan Rakor Persiapan, melaksanakan penandatangan perjanjian, mengevaluasi, serta menyusun konsep siaran pers terkait penyelesaian komitmen kerja sama bilateral Indonesia-Amerika Serikat pada KTT STM (Industry outreach, bilateral meeting, dan SEAFEC)	8. Melakukan Rakor Persiapan, melaksanakan penandatangan perjanjian, mengevaluasi, serta menyusun konsep siaran pers terkait penyelesaian komitmen kerja sama bilateral Indonesia-Kanada pada Ratifikasi I-CA CEPA
					4. Melakukan Rakor Persiapan, melaksanakan penandatangan perjanjian, mengevaluasi, serta menyusun konsep siaran pers terkait penyelesaian komitmen kerja sama bilateral Indonesia-Tiongkok pada International Seminar on Upskilling Negotiation for Government Officials of Indonesia	7. Melakukan Rakor Persiapan, melaksanakan penandatangan perjanjian, mengevaluasi, serta menyusun konsep siaran pers terkait penyelesaian komitmen kerja sama bilateral Indonesia - EAEU pada Ratifikasi Indonesia - EAEU FTA	9. Melakukan Rakor Persiapan, melaksanakan penandatangan perjanjian, mengevaluasi, serta menyusun konsep siaran pers terkait penyelesaian komitmen kerja sama bilateral Jepang pada Ratifikasi Protokol Perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)	10. Melakukan Rakor Persiapan, melaksanakan penandatangan perjanjian, mengevaluasi, serta menyusun konsep siaran pers terkait



				Peningkatan kepuasan layanan KSP dalam upaya	1. Penyusunan kuesioner survei, pelaksanaan survei, dan pelaporan survei kepuasan layanan	2. Penyusunan kuesioner survei, pelaksanaan survei, dan pelaporan survei kepuasan	3. Penyusunan kuesioner survei, pelaksanaan survei, dan pelaporan	4. Penyusunan kuesioner survei, pelaksanaan survei, dan
3	Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi,	3.1 Indeks Kepuasan Layanan Penyelenggara	Baik (3 dari 4)	Perencanaan, Implementasi, Evaluasi, dan Partisipasi publik pada penyelesaian komitmen kesepakatan dalam implementasi kerja sama ekonomi bilateral	1. Melakukan Rakor Persiapan, melaksanakan penandatanganan perjanjian, mengevaluasi, serta menyusun konsep siaran pers terkait implementasi IPEF on Supply Chain LRAB Meeting	2. Melakukan Rakor Persiapan, melaksanakan penandatanganan perjanjian, mengevaluasi, serta menyusun konsep siaran pers terkait implementasi IK CEPA on the 4th Committee on Economic Cooperation Meeting Indonesia-Korea	3. Melakukan Rakor Persiapan, melaksanakan penandatanganan perjanjian, mengevaluasi, serta menyusun konsep siaran pers terkait implementasi IPEF on Supply Chain Council	4. Melakukan Rakor Persiapan, melaksanakan penandatanganan perjanjian, mengevaluasi, serta menyusun konsep siaran pers terkait implementasi IPEF on Supply Chain Crisis Response Network
						5. Melakukan Rakor Persiapan, melaksanakan penandatanganan perjanjian, mengevaluasi, serta menyusun konsep siaran pers terkait Forum The 16th Ministerial Meeting 6 W/G Indonesia-Singapura (Joint Report to Leaders pada the 16th Ministerial Meeting 6 W/G Indonesia-Singapura)	Economic Cooperation (JCEC) RI-Korea (Agreed Minutes of the 3rd Ministerial Meeting JCEC RI-Korea)	
						6. Melakukan Rakor Persiapan, melaksanakan penandatanganan perjanjian, mengevaluasi, serta menyusun konsep siaran pers terkait Forum SKB RI – Belarus (Agreed Minutes of JCM RI – Belarus)		

Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi bilateral yang berkualitas	aan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral	92%	penyelesaian komitmen kerjasama dan isu strategi perjanjian dengan negara mitra oleh Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral Tahun 2026	KSP di bidang kerja sama ekonomi bilateral TW 1	layanan KSP di bidang kerja sama ekonomi bilateral TW 2	survei kepuasan layanan KSP di bidang kerja sama ekonomi bilateral TW 3	pelaporan survei kepuasan layanan KSP di bidang kerja sama ekonomi bilateral TW 4
4. Tenwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Profesional	4.1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral	92%	Optimalisasi Implementasi Reformasi Birokrasi General di Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral	1. Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Manual IKU 2. Penyusunan Laporan Kinerja TW 1 3. Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI TW 1 4. Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja	5. Penyusunan Laporan Kinerja TW 2 6. Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI TW 2 7. Penyusunan Revisi Renja 2026 8. Penyusunan RENUA 2027 9. Penyusunan TOR dan RAB	10. Penyusunan Laporan Kinerja TW 3 11. Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI TW 3 12. Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri SPIP 13. Penyusunan Matriks Manajemen Risiko	14. Penyusunan Laporan Kinerja TW 4 15. Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI TW 4

Jakarta, 31 Januari 2026

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral

  
Inwan Sinaga